

Pemetaan Partisipatif dalam Mitigasi Bencana



Afrinia Lisdiyati Permatasari SSI MSc
Dosen Prodi Geografi
Universitas AMIKOM Yogyakarta

MENURUT (UURI, 2007) pasal 1 No 24 tahun 2007, mitigasi adalah se-

rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (Westen, 2005) mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural mengacu pada pembangunan fisik untuk mengurangi atau menghindari adanya kemungkinan dari dampak bahaya, yang mencakup langkah-langkah secara teknik, konstruksi yang tahan bahaya serta infrastruktur yang mampu melindungi dari ancaman bahaya. Mitigasi

non struktural mengacu pada kebijakan, kesadaran, pengembangan pengetahuan, komitmen masyarakat, metode, termasuk mekanisme partisipatif, modifikasi kerentanan, kerusakan, bahaya dan gangguan. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh ancaman bahaya pada masyarakat.

Negara Indonesia secara geografis terletak di daerah bencana. Salah satu penyebabnya yaitu karena dilalui oleh tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan Lempeng Pasifik. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab

nya banyak terjadi bencana geologis di Indonesia. Salah satu upaya mitigasi seacar nin struktural adalah dengan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Teknik pengumpulan informasi langsung dari masyarakat dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat atau keikutsertaan kelompok dalam melakukan inventarisasi kebencanaan (BNPB, 2017; Taufiq et al., 2017). Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pemetaan potensi dan mitigasi kebencanaan dapat menghasilkan informasi yang detail dan dapat disesuaikan dengan kondisi

sumber daya dan daya dukung dalam langkah mitigasi kebencanaan (Suheringtyas et al., 2021).

Peta Partisipatif dalam bahasa Inggris dikenal dengan Participatory Mapping dapat juga diartikan sebagai Peta-Partisipatif (Peta yang Partisipatif), konsep ini berkembang tahun 90-an merupakan pengembangan dari pemetaan partisipatif tahun 1980-an yang mengadopsi pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Participatory Learning Action (PLA). Participatory Mapping merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan

partisipatif untuk memecahkan masalah dalam suatu komunitas dengan melakukan diskusi. Konsep ini dikenal juga dengan nama Public Participation GIS yang diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar International Conference on Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS, Santa Barbara, California 14-17 Oktober 1998, yang mencakup spesifik kajian wilayah Amerika Utara. Participatory Mapping adalah praktek nyata yang dikembangkan dari pendekatan PRA/ PLA dan kajian keruangan serta manajemen komunikasi; merupakan



proses yang berkelanjutan, fleksibel, dan dapat diadaptasi dalam sosial serta kultur serta aspek lingkungan bio-fisik yang berbeda tergantung dari interaksi secara partisipatif oleh stakeholder dalam menghasilkan dan mengatur spatial data, dan menggunakan hasil informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, memudahkan proses dialog antar komponen, mengefektikan proses komunikasi serta mendukung advokasi dan pelaksanaannya.***

PRESTASI ENAM KALI BERTURUT-TURUT

Wonosobo Kembali Raih Opini WTP dari BPK



**DINAS KOMINFO
KABUPATEN WONOSOBO**

WONOSOBO (KR) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah 20-21 kepada Kabupaten Wonosobo bersama 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jateng di Aula Kantor BPK Perwakilan Jateng di Semarang, Senin (22/5). Penyerahan simbolis diberikan Kepala Perwakilan BPK Jateng Ayub Amali kepada para Kepala

Daerah dan Ketua DPRD masing-masing.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat yang menerima penghargaan Opini WTP bersama Ketua DPRD Wonosobo Eko Prasetyo HW, mengungkapkan bahwa penghargaan Opini WTP dari BPK RI ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Pemkab Wonosobo yang mampu mempertahankan prestasi yang sama enam kali berturut-turut, sejak 2017 lalu. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan bersama atas dedikasi, kerja keras, dan sinergitas dari seluruh jajaran Pemkab Wonosobo dalam menyelesaikan laporan keuangan daerah.

Menurut Afif, Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah, sudah mestinya melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas penyelenggara kegiatan pemerintahan di Pemkab

Wonosobo secara lebih dini dan tegas. "Kami minta peran serta inspektorat dalam melakukan pengawasan secara tegas dan harus lebih dini," tegasnya.

Atas nama Pemkab Wonosobo, Bupati bersama Wakil Bupati Muhammad Albar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan cerdas serta disiplin dari jajaran OPD di lingkungan Pemkab Wonosobo. "Peran serta yang diberikan kepada pemerintah, menjadikan ASN di lingkungan Pemkab Wonosobo 'step by step' atau setahap demi setahap ada peningkatan performa lebih baik. Tentunya ini merupakan hal penting dan utama bagi jajaran inspektorat yang selama ini terus melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan," tuturnya.

Bupati mengingatkan, dengan capaian prestasi terse-

but tentu menjadi sebuah peringatan yang harus dijadikan cambuk dorongan semangat kerja ke depan, sehingga nantinya mampu mencapai prestasi yang benar-benar bersih. "Capaian ini menjadi warning bagi kita sekalian. Kita tidak boleh berbangga hati, tidak boleh merasa puas, namun justru dijadikan cambuk ke depan untuk kita semua, sehingga betul-betul mampu mencapai tahapan WTP yang benar-benar clean, dan bukan WTP dengan banyak catatan," pesannya.

Bupati berharap agar capaian ini menjadi pilar penting untuk kita lakukan peningkatan. Jangan sampai terjebak di lubang yang sama, artinya kalau ke depan dilakukan uji petik lagi terhadap OPD terkait yang temuan sama seperti tahun ini, maka menan-

dakan tidak ada perubahan. Oleh sebab itu Inspektorat harus menyiapkan diri menjadi katalisator sekaligus fasilitator untuk menyampaikan kepada teman OPD terkait dengan peringatan dini.

"Kalau ada sesuatu, ada persoalan, inspektorat harus tau, sehingga jika telah dilakukan peringatan dini maka harapannya segera bisa dilakukan perbaikan dan perubahan terhadap hal-hal yang berpotensi kemungkinan adanya terjadi penyimpangan. Semua harus dilakukan secara intensif," pesannya.

Bukan hanya Inspektorat, Bupati juga berharap BPP-KAD yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan baik anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan kas daerah untuk mempertahankan Opini WTP serta melakukan langkah-

langkah riil dan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah menjadi lebih akuntabel. Termasuk perlu dibangunnya sistem yang mampu mengintegrasikan rangkaian perencanaan, penyusunan anggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban.

Secara tegas Afif Nurhidayat mengatakan tidak ingin ada ASN maupun OPD di

lingkungan Pemkab Wonosobo yang tersangkut dengan masalah hukum, dimasa kepemimpinannya. Pihaknya akan secara maksimal memersamainya dan akan selalu menjalin koordinasi dengan pihak terkait bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, peran serta inspektorat dalam mendampingi teman-teman OPD menjadi sangat penting. (Art)



KR-Istimewa

Bupati Wonosobo dan Ketua DPRD beserta jajaran pimpinan OPD dengan Ketua Perwakilan BPK Jateng.

Penjabat Walikota Minta Uang Terancam Dipecat

SALATIGA (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menekankan dirinya bakal memecat Penjabat (Pj) Walikota Salatiga jika melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar aturan.

"Pj Walikota *neka-neka* dan sedikit-dikit minta uang dan jual beli jabatan di kalangan ASN, saya pecat. Bila penjabat walikota berbuat jual beli jabatan dan lainnya laporkan ke saya. Sekali lagi akan saya pecat jika melanggar. Tiap tiga bulan saya evaluasi," tandas Ganjar Pranowo di hadapan ASN saat memberi arahan di Pemkot Salatiga, Selasa (24/5).

Ganjar Pranowo datang ke Salatiga setelah dua hari Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng Noegraha Rachmadi mulai bekerja di Salatiga melanjutkan pemerintahan pasca jabatan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2017-2022, Yuliyanto-Muh Haris berakhir.

Ganjar menekankan agar ASN di Pemkot Salatiga kompak dalam bekerja melayani masyarakat. Jangan kaget ketika Pj Wali-

kota Salatiga yang ia tunjuk akan bersikap tegas terhadap gratifikasi. Sesuai memberi pengarahan kepada ASN di Salatiga, Ganjar kepada wartawan mengatakan ancaman pemecatan terhadap penjabat (Pj) tidak hanya berlaku untuk Salatiga saja melainkan seluruh daerah di Jateng.

"Ancaman pemecatan ini berlaku juga untuk daerah lain bukan hanya Salatiga saja," tandasnya. Penjabat Walikota Salatiga, Sinoeng Noegraha Rachmadi mulai bekerja di Salatiga pada Senin (23/5) diawali dengan serah terima jabatan dari Walikota Salatiga 2017-2022, Yuliyanto.

Pj Walikota Salatiga pada apel luar biasa di halaman Pemkot Salatiga, Selasa (24/5) mengajak semua OPD yang ada di Pemerintah Kota Salatiga tancap gas mempercepat akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Salatiga. Sinoeng melakukan sidak ke beberapa bagian kantor yang ada di lingkungan Jalan Sukowati 51 yakni Setda dan Bappeda. (Sus)

11 KALI JAWA TENGAH RAIH OPINI WTP DARI BPK



Gubernur Ganjar Pranowo (rambut putih) bersama Pimpinan Dewan. (foto - Humas)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemprov Jateng tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali, dalam rapat paripurna DPRD Jateng Rabu (25/5). Rapat itu digelar secara daring dan luring. Penyerahan LHP BPK Perwakilan Jateng menjadi agenda utama dalam rapat paripurna tersebut. Hadir dalam acara tersebut, para kepala subauditorat BPK Perwakilan Jateng dan tim pemeriksa BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2021.

Ayub Amali mengatakan, pemeriksaan keuangan meru-

upakan bagian dari tugas konstitusional BPK yang tujuannya untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ayub Amali menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Jateng yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga penyusunan laporan.

Ayub Amali juga mengucapkan selamat atas opini WTP ke 11 yang berhasil diperoleh Pemprov Jateng. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian, antara lain masalah penatausahaan aset tetap dan penyajian piutang pajak kendaraan bermotor. BPK Perwakilan Jateng berharap LHP yang disampaikan dapat bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan APBD.

Selain menyerahkan LHP atas LKPD Pemprov Jateng TA 2021, BPK Perwakilan Jateng juga menyampaikan LHP Ki-

nerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengurangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemprov Jateng, dan buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2021. IHPD 2021 memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng selama tahun 2021 di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rapat Paripurna tersebut anggota DPRD yang hadir sejumlah 68 orang dari 120 orang. Menurut Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman yang didampingi tiga wakil ketua lainnya yakni Heri Pudyatmoko, Quatly Abdulkadir Alkatiri, dan Ferry Wawan Cahyono, dari aturan tata tertib DPRD, rapat sudah memenuhi quorum.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jateng termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas. "Bukan berarti kita asyik-asyik

saja, asoy-asoy saja tidak. Masih ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita," tutur Ganjar.

Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan. Untuk itu Pemprov Jateng akan memperbaiki BPN untuk memperbaiki kinerja.

Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dioptimalkan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng. "Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu perwaktu setiap kali mereka reses. Kontrol dari Dewan tersebut bagi saya menjadi catatan agar kita tidak offside," kata Ganjar. (Anif Maghfiroh)

Sambut HUT Ke-175, Disiapkan Rangkaian Kegiatan



KR-Mulyawan

Masruri
BOYOLALI (KR) - Kabupaten Boyolali akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-175 pada Minggu (5/6). Serangkaian acara telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Susu ini.

Diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri karena Kabupaten Boyolali masih menerapkan PPKM level 2 maka peringatan Hari Jadi Ke-175 Kabupaten Boyolali dilakukan dengan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kegiatan-kegiatan yang menyertai itu ada beberapa kegiatan karena kita masih level 2 yang masih semi terbatas

tidak seluruhnya (digelar)," ungkap Sekda Masruri.

Acara akan dimulai pada Kamis (2/6) dengan agenda ziarah di makam Ki Ageng Pandanaran yang berada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Boyolali.

Dilanjutkan pada Sabtu (4/6/2022) digelar acara diselenggarakan khataman Alquran sekaligus bertujuan untuk mengirim doa kepada Ki Ageng Pandan Arang, tokoh yang diyakini memunculkan asal muasal nama Boyolali.

Acara tersebut digelar di Kali Gedhe di Kampung Sumberlerak, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali yang akan dilakukan oleh 22 orang dari 22 kecamatan. "Tanggal 5 Juni 2022 ada acara upacara besar yang akan melibatkan sekitar 1.000 lebih orang di Alun-Alun dengan pakaian adat Jawa, semua ASN di lingkungan kabupaten," terang Masruri.

Pada Kamis (9/6/2022) akan diadakan wayangan di Alun Alun dengan Lakon Jimat Kalimusodo. Sedangkan pada Jumat-Sabtu (10-11/6/2022) ada pertandingan tenis di Lapangan Tenis Poncobudoyo, Kecamatan Boyolali dengan total hadiah Rp 11 juta yang diikuti oleh warga Kabupaten Boyolali.

Kemudian Minggu-Senin (12-13/6) ada pula pertandingan bulutangkis di Lapangan Tenis Poncobudoyo, Kecamatan Boyolali dengan lima kategori yakni sebelum dini, usia dini, pelajar, muda, dan dewasa. (R-3)